

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 (dua) di Dunia, yakni 95.161km (Lasabuda, 2013) dan sebagai negara yang kaya akan sumberdaya kelautan. Potensi nilai ekonomi maritim Indonesiamencapai 171 miliar dollar AS per tahun (Dewan Kelautan Indonesia ,2013). Adanya potensi ekonomi menyebabkan masyarakat hidup dan tinggal disepanjang pesisir pantai. Kemudian membentuk sebuah dinamika kehidupan sosial ekonomi secara turun temurun yang umumnya bekerja sebagai nelayan dan petambak. Mereka adalah masyarakat pesisir, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan bergantung hidupnya dalam ekosistem laut (Soegiarto dalam Dahuri, 2001).

Segala potensi yang dimiliki ternyata tidak serta merta menjadikan masyarakat pesisir berada pada tingkat kesejahteraan yang baik. Kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan (Dahuri, 2001). Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 yang mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan dalam Wasak, 2012). Dengan kata lain, persoalan kemiskinan masyarakat pesisir terletak pada cara hidup yang bergantung pada hasil tangkapannya. Bila hujan atau badai, maka tidak bekerjalah mereka para nelayan. Faktor cuaca menjadi sangat berpengaruh. Ditambah lagi dengan metode penangkapan tradisional yang digunakan secara turun temurun. Bagaimana sebuah mata rantai, kemiskinan akan selalu menjadi ancaman dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan produktifitas masyarakat pesisir melalui penyuluhan dan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok nelayan, tetapi masyarakat pesisir masih belum mampu terlepas dari jeratan kemiskinan. Oleh Karena itu, berbekal kekayaan sumberdaya kelautan yang

dimiliki, sektor pariwisata dianggap berpotensi dalam pengembangan wilayah pesisir. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4 tentang Kepariwisataan yang menerangkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kepariwisataan dijadikan sebagai salah satu sektor Pembangunan Nasional dalam beberapa tahun belakang, walaupun sumbangannya terhadap PDB Nasional masih relatif kecil yaitu 4,03% (Kemenpar, 2017). Besarnya potensi pariwisata telah mempengaruhi iklim pembangunan di banyak daerah otonom di Indonesia, diantaranya bahkan menjadikan sektor pariwisata sebagai orientasi dalam pembangunan. Pengelolaan yang baik akan memberi kesempatan masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari aktifitas pariwisata.

Kota Pariaman merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002 yang terletak dipesisir barat Sumatera. Panjang garis pantainya 12 Km dan memiliki 5 (lima) pulau kecil yang berdekatan. Luas wilayah hanya 73,36 km² atau 1/9 luas kota padang (ibukota Sumatera Barat) dan tidak memiliki Sumber Daya Alam lainnya seperti tambang atau perkebunan. Sebagaimana Visi Pemerintah Kota Pariaman tahun 2013-2018 “Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama”, sektor pariwisata bahari dijadikan sebagai poros dalam melaksanakan pembangunan.

Keindahan laut dan pantai serta pulau-pulau kecil yang dimiliki, didukung dengan kuliner, produk khas, dan keunikan budaya masyarakat setempat, menjadi modal untuk menarik penikmat pariwisata, baik domestik maupun mancanegara. Saat ini, terdapat 11 lokasi destinasi wisata di Kota Pariaman yang seluruhnya terletak di sepanjang pantai wilayah Kota Pariaman (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. 2017), dan 3 (tiga) diantaranya merupakan destinasi yang menggunakan konsep dari *ecotourism* yaitu Wisata Pulau Angso Duo, Penangkaran Penyu, dan Hutan *mangrove*. Ekowisata sebagai konsep pariwisata

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan obyek pariwisata lainnya, yaitu : wisata yang bertanggung jawab pada konservasi lingkungan; wisata yang berperan dalam usaha–usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal; dan wisata yang menghargai budaya lokal (Hakim, 2004).

Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kota Pariaman mengembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan. Berkembangnya *ecotourism* secara bertahap diharapkan mampu melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga memberikan peluang terhadap peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, *ecotourism* di Kota Pariaman dijadikan sebagai salah satu strategi untuk pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kota Pariaman.

B. Rumusan Masalah

Kemajuan sektor pariwisata di Kota Pariaman ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Lompatan dimulai pada tahun 2014 atau pada tahun pertama pelaksanaan visi dan misi Pemerintahan Kota Pariaman, terjadi peningkatan sebesar 79 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya. Bahkan jumlah tersebut bertambah 2 (dua) kali lipat lebih banyak pada tahun berikutnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, 2017). Kondisi tersebut tentu memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian masyarakat disekitar objek wisata.

Akan tetapi, peningkatan yang terjadi justru mengancam keberlanjutan pariwisata terutama pada ketiga destinasi *ecotourism* di Kota Pariaman. Banyaknya wisatawan yang berkunjung berbanding lurus dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan prinsip pengembangan *ecotourism* yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam pariwisata.

Pemberdayaan terhadap masyarakat setempat menjadi salah satu pendekatan dalam pengelolaan destinasi *ecotourism*. Masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan berubah menjadi pelaku wisata, baik itu terlibat langsung maupun secara tidak langsung. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian mereka.

Berkaitan dengan itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ecotourism* di Kota Pariaman?
2. Apakah pengembangan *ecotourism* mempunyai dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pesisir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan *ecotourism* di Kota Pariaman.
2. Mengidentifikasi dampak *ecotourism* terhadap perekonomian masyarakat pesisir di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi lembaga pendidikan, dan peneliti selanjutnya.
2. Memberi masukan bagi Pemerintah Kota Pariaman / pengambil kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan produk kepariwisataan.

